

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarini, N., 2001, Pelaksanaan Audit Lingkungan Dalam Sistem Manajemen Lingkungan Perusahaan dan Keterkaitannya dengan Standardisasi Internasional ISO 14000, Tesis, Universitas Diponegoro
- Averus, A., Pitono, A., 2013, Pengaruh Implementasi Kebijakan Pertambangan Terhadap Efektivitas Penanganan Kualitas Lingkungan Hidup Pada Dinas Pekerjaan Umum, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Palu, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 15 no. 2 Hal 167-177
- Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung, 2015, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung
- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung, 2014, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung, Bandar Lampung
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, 2016, Kecamatan Sukabumi Dalam Angka 2016, Bandar Lampung
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, 2015, Kecamatan Sukabumi Dalam Angka 2015, Bandar Lampung
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, 2014, Kecamatan Sukabumi Dalam Angka 2014, Bandar Lampung
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, 2015, Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2015, Bandar Lampung
- Barbosa, M., Alam, K., Mushtaq, S., 2016, Water policy implementation in the state of São Paulo, Brazil: Key challenges and opportunities, *Environmental Science & Policy*, Vol: 60, p. 11–18
- Bhatasara, S., 2013, Black granite mining and the implications for the development of sustainability in Zimbabwe: the case of Mutoko communities, *Environment, Development and Sustainability*, Vol 15:p. 1527–1541
- Costanza, J., 2016, Mining Conflict and the Politics of Obtaining a Social License: Insight from Guatemala, *World Development*, Vol. 79, pp. 97–113
- CV Budhi Wirya, 2011, Dokumen Studi Kelayakan, CV Budhi Wirya, Bandar Lampung

- CV Sari Karya, 2015, Dokumen Rencana Pasca Tambang, CV. Sari Karya, Bandar Lampung
- CV Sari Karya, 2015, Dokumen Rencana Reklamasi, CV. Sari Karya, Bandar Lampung
- Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung, 2015, Profil Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung, Lampung
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (DJMB b), 2016, Kebijakan Pengawasan Teknik Bidang Minerba (Implementasi UU 23 Tahun 2014), Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Kementerian ESDM tanggal 21 Juli 2016, Jakarta
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (DJMB a), 2016, Penataan Izin Usaha Pertambangan, disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Kementerian ESDM tanggal 21 Juli 2016, Jakarta
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (DJMB), 2015, Laporan Kinerja (Lakin) Tahun 2015, Jakarta
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (DJMB), (2011), Statistik Mineral dan Batubara Tahun 2011, Jakarta
- Dewi, J., 2011, Studi Implementasi Keterbukaan Akses Informasi Untuk Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pelaksanaan Akses Informasi Dalam Kebijakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), Tesis, Universitas Indonesia
- Dubinski, J., 2013, Sustainable Development Of Mining Mineral Resources, *Journal of Sustainable Mining*, Vol. 12 (2013), No. 1, pp. 1–6
- Dunn, W., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Emzir, 2010, Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data, Rajawali Pers, Jakarta
- Febliany, I., Firiya, N., Paselle, E., 2014, Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penyerapan Investasi Di Kalimantan Timur (Studi pada Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur), *eJournal Administrative Reform*, Vol. 2 (4): 2461-2472
- Firmanto, A., 2012, Pengendalian Degradasi Lingkungan di Sektor Pertambangan, *Warta Minerba*, Edisi 14 Hal. 4-9, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Jakarta

- Ghorbani, A., et al, 2015, Ecotourism sustainable development strategies using SWOT and QSPM model: A case study of Kaji Namakzar Wetland, South Khorasan Province, Iran, *Tourism Management Perspectives*, 16, 290-297
- Groselj, P., Stirn, L.Z., 2015, The environmental management problem of Pohorje, Slovenia: A new group approach within ANP - SWOT framework, *Journal of Environmental Management*, 161, p. 106-112
- Gustina, S., Amin, D., 2014, Optimalisasi Pelaksanaan Dekonsentrasi Pertambangan Mineral dan Batubara, *Warta Minerba*, Edisi 20 Hal. 20-25, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Jakarta
- Hakim, R., Sugandhy, A., 2007, Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, Bumi Aksara, Jakarta
- Harahap, A., 2012, Konflik Pertambangan di Era Otonomi Daerah, Blog Otdanews, 19 September, diunduh dari <http://www.otdanews.com/read-news-9-0-48-konflik-pertambangan-di-era-otonomi-daerah.otdanews>, diakses 11 Mei 2016
- Inayah, 2010, Studi Persepsi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah Di Kota Tangerang, Tesis, Universitas Indonesia
- Jaya, L., Herjuna, S., 2013, Urgensi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Minerba di Daerah, *Warta Minerba*, Edisi 17 Hal. 8-11, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Jakarta
- Kalaba, F., 2016, Barriers to policy implementation and implications for Zambia's forest ecosystems, *Forest Policy and Economics*, Volume 69, p. 40-44
- Kementerian ESDM, 2016, Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengalihan PNS Yang Membidangi ESDM, disampaikan pada kegiatan Verifikasi pengalihan PNS di Aula Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung tanggal 15 Juni 2016, Bandar Lampung
- Kurnia, R., 2013, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sektor Pertambangan, *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Volume 11, Nomor 1, p. 65-70
- Laksana, W., 2012, Implementasi Corporate Social Responsibility Dalam Membentuk Reputasi Perusahaan (Studi Kasus Program Peduli Pendidikan di PT Pupuk Kalimantan Timur), Tesis, Universitas Indonesia

- Laurence, D., 2011, Establishing a sustainable mining operation: an overview, *Journal of Cleaner Production*, Volume 11, p.278-284
- Lei, K., Pan, H., Lin, C., 2016, A Landscape Approach Towards Ecological Restoration and Sustainable Development of Mining Areas, *Ecological Engineering*, Vol: 90, p.320-325
- Mani, V *et all*, 2016, Supply chain social sustainability for developing nations: Evidence from India, *Resources, Conservation and Recycling*, Vol. 111, p. 42-52
- Margareth, C., Naresworo, S., Nasarudin, M., Handayani, R., 2014, Mengapa Kegiatan Pertambangan di Indonesia Menjadi Sangat Menarik?, *Warta Minerba*, Edisi 20 Hal. 58-70, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Jakarta
- Mariana, I., 2010, Evaluasi Implementasi Kebijakan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Tesis, Universitas Indonesia
- Naka, K., Hammet, A., Stuart, W., 2000, Constraints and opportunities to forest policy implementation in Albania, *Forest Policy and Economics*, Vol. 1, p. 153-163
- Nordtomme, M., Bjerkan, K., Sund, A., 2015, Barriers to urban freight policy implementation: The case of urban consolidation center in Oslo, *Transport Policy*, Vo. 44, p. 179–186
- Nurchayani, T. 2011, Kajian Pemanfaatan Lubang Bekas Tambang (*Void*) Di Pt Adaro Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan, Tesis, Universitas Indonesia
- Packey, D., Kingsnorth, D., 2016, The impact of unregulated ionic clay rare earth mining in China, *Resources Policy*, Vol. 48, p. 112–116
- Plank, S., Walsh, B., Behrens, P., 2016, The expected impacts of mining: Stakeholder perceptions of a proposed mineral sands mine in rural Australia, *Resources Policy*, Vol. 48, p. 129-136
- Prasodjo, E. 2015, Model Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Batubara Berkelanjutan (Studi Kasus Pertambangan Batubara di Sekitar Kota Samarinda, Kalimantan Timur), Disertasi, Institut Pertanian Bogor
- PT. Gandapahala Taraperkasa, 2014, Dokumen Studi Kelayakan, PT. Gandapahala Taraperkasa, Bandar Lampung
- Puluhulawa, F., 2011, Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 2, p. 306-316

- Purnaweni, H., 2004, Implementasi Kebijakan Lingkungan Di Indonesia: Hambatan Dan Tuntutan, "Dialogue" JIAKP, Vol. 1, No. 3, Hal. 500-512
- Purwitasari, A., 2012, Implementasi Kebijakan Program Jampersal Di Kabupaten Lebak Propinsi Banten Tahun 2011, Tesis, Universitas Indonesia
- Ranan, 2010, Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Usaha Pertambangan Di Kalimantan Tengah, Tesis, Universitas Indonesia
- Rangkuti, F., 2006, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Rauch, P., et al, 2015, SWOT analysis and strategy development for forest fuel supply chains in South East Europe, *Forest Policy and Economics*, 61, 87-94
- Roopnarine, L., 2006, Small Scale Gold Mining and Environmental Policy Challenge in Guyana: Protection or Pollution
- Shen, L., Muduli, K., Barvw, A., 2015, Developing a sustainable development framework in the context of mining industries: AHP approach, *Resources Policy*, 46, 15-26
- Sitinjak, P., 2013, Peran Pertambangan Bagi Indonesia, *Warta Minerba*, Edisi 16 Hal. 8-11, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Jakarta
- Standar Nasional Indonesia, 2005, SNI 19-14001-2005, Sistem manajemen lingkungan-Persyaratan dan panduan penggunaan, SNI, Jakarta
- Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung
- Subarsono, A., 2009, Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sukaesih, E., 2011, Implementasi Kebijakan Difusi Hasil Teknologi Lingkungan Di Serpong Dan Teknologi Agro Di Lembang, Tesis, Universitas Indonesia
- Sugiana, M., 2012, Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Jakarta Selatan, Tesis, Universitas Indonesia
- Supriyatno, 2010, Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis (Kasus Di Sd Negeri Cileungsi 06 Dan Sd Negeri Cinyosog 02 Bogor), Tesis, Universitas Indonesia

- Susigit, B., 2012, Pengawasan Konservasi Untuk Mendukung Kestinambungan Sumberdaya Dan Cadangan Dalam Rangka Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, disampaikan dalam Diklat Fungsional Inspektur Tambang, Bandung
- Susilawati, N., 2012, Implementasi Kebijakan Pengeluaran Pada Kawasan Agropolitan Kota Batu, Tesis, Universitas Indonesia
- Suwitri, S., Purnaweni, H., Kismartini, 2014, Analisis Kebijakan Publik, Universitas Terbuka, Banten
- Suyartono, 2003, Good Mining Practice: Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar, Studi Nusa, Jakarta
- Syahrir, R., 2014, Mengenal Lebih Dekat Konsep Pertambangan Berkelanjutan dan Implementasinya di Indonesia, Indonesian Institute For Sustainable Mining, diunduh dari <http://iism.or.id/index.php/id/publikasi/5-mengenal-konsep>, diakses 26 Mei 2016
- Tachjan, H., 2006, Implementasi Kebijakan Publik, Cetakan 1, ISBN: 979-24-7422-6, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung bekerjasama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad, Bandung
- Tribun Lampung, 2016, Omzet Tambang Batu Ilegal di Bukit Balau Rp 35 Juta per Hari, diunduh dari <http://lampung.tribunnews.com/2016/05/24/omzet-tambang-batu-ilegal-di-bukit-balau-rp-35-juta-per-hari>, diakses 18 Juli 2016
- Wahab, S., 2008, Analisis Kebijaksanaan : Dari Reformasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta
- Winarno, B., 2012, Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus), CAPS, Jakarta
- Wulan, R., 2012, Dampak Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam Di Kota Semarang (Studi Kasus Kecamatan Ngaliyan), Prgram Studi Magister Ilmu Lingkungan, Tesis, Universitas Diponegoro
- Zhu, S., Cherni, J., 2009, Coal mining in China: policy and environment under market reform, *International Journal of Energy Sector Management*, Vol. 3 No. 1, p. 9-28

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM 2015-2019
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
- Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1453.K/29/Mem/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Umum
- Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/586/II.06/HK/2015 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Dan Penegakan Hukum Penghentian Kegiatan Penambangan Tanpa Izin (*Illegal Mining*) di Provinsi Lampung